

Evaluasi Kebijakan Program Pinjaman Modal Kredit Bergulir Untuk Pelaku Usaha Kecil dan Menengah Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM di Kabupaten Kutai Barat

Erlinsiana¹, DB. Paranoan², Enos Paselle³

Abstrak

Dari hasil temuan pada objek penelitian mengenai Kebijakan Program Pinjaman Modal Kredit Bergulir menunjukkan bahwa secara aplikatif terindikasi cukup efektif. Hal tersebut dapat diketahui dari parameter yang ditetapkan bahwa belum sepenuhnya mendukung proses pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah. Secara aplikatif program pinjaman modal kredit bergulir masih dihadapkan pada persoalan-persoalan teknis dan administratif, sehingga dalam perjalanannya kurang berjalan sebagaimana yang diharapkan. Meski demikian memiliki nilai manfaat yang besar dalam mendukung pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam mengembangkan usahanya. Kurang optimalnya pelaksanaan program pinjaman modal kredit bergulir di wilayah Kabupaten Kutai Barat disebabkan oleh masih kurangnya sosialisasi terhadap pelaku usaha, terbatasnya sarana dan prasarana operasional untuk mendukung pelaksanaan program, terbatasnya keterampilan dan keahlian pelaku usaha dan aparat pembina di Kabupaten Kutai Barat kurang mampu dalam memanfaatkan sumber daya alam yang potensial.

Kata Kunci: Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Pinjaman Modal, Pembinaan

Pendahuluan

Pada era otonomi daerah, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai program telah dilakukan, baik melalui program penanggulangan kemiskinan perkotaan (P2KP), Program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM) maupun melalui bantuan bergulir yang disalurkan pada usaha kecil dan menengah. Kebijakan tersebut bermaksud untuk memperbaiki dan meningkatkan kehidupan masyarakat lebih sejahtera.

¹ Alumni Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda

² Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda

³ Dosen Magister Ilmu Administrasi Negara Fisip Universitas Mulawarman Samarinda

Untuk memujudkan harapan tersebut memang tidaklah semudah membalikkan tangan tetapi perlu proses yang panjang dan didukung oleh berbagai factor. Meskipun dari berbagai program tersebut mampu membawa perubahan yang berarti terhadap taraf hidup kesejahteraan masyarakat, tetapi perubahan tersebut belum signifikan atau belum semua masyarakat hidup lebih sejahtera, bahkan ditemukan adanya indikasi kehidupan masyarakat jauh dari harapan

Kondisi demikian, sebagai akibat dari kebijakan pemerintah yang berpihak kepada kepentingan pemilik modal yang kuat, sementara kelompok menengah bawah kurang mendapat perhatian. Padahal dalam teori ekonomi makro, bahwa pembangunan perekonomian rakyat amatlah penting untuk menyangga pembangunan nasional, maka dari itu dengan mencermati esensi pembangunan ekonomi kerakyatan maka perlu ditumbuh kembangkan sehingga dapat mendukung pembangunan ekonomi nasional. Dengan mencermati fenomena tersebut maka perlu dievaluasi secara tepat dengan mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang dihadapi, sehingga dapat diketahui secara jelas mengetahui permasalahan yang sebenarnya terjadi. Atas dasar permasalahan tersebut kemudian mencari alternatif yang terbaik untuk penanganannya (Swasono, 1998 :17).

Dipilihnya sektor ekonomi kerakyatan dalam kajian ini mengingat sumbangannya terhadap pembangunan nasional yang begitu besar, maka selayaknya mendapat perhatian pemerintah. Sektor ekonomi kerakyatan dimaksud suatu usaha kecil dan menengah (UKM) diharapkan dapat tumbuh dan berkembang sehingga dapat menjadi sumber penghasilan andalan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari urgensi dari peranan mikro kecil dan menengah dalam perekonomian nasional, yang perlu diperhitungkan, dimana sektor mikro kecil dapat menjadi katup pengaman (*savety belt*) bagi masalah-masalah sosial ekonomi seperti penyediaan peluang kerja, penampung terakhir tenaga-tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). (Thoah, (2000 : 6)

Peranan usaha kecil dan menengah dalam penyedia lapangan kerja juga dapat diamati dari data BPS tahun 2009 bahwa jumlah keseluruhan usaha manufaktur di Indonesia sebanyak 4.524 unit, ternyata 59,2% merupakan unit usaha Kecil dan Rumah Tangga (IKRT), sedangkan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada IKRT dari 120.000 inut, mampu menyediakan kesempatan kerja sebesar 37,3 % dari jumlah keseluruhan kesempatan kerja. Dengan mencermati data tersebut betapa besar kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja yang direkrut oleh usaha mikro Kecil dan Rumah Tangga (IKRT)

Senada dengan pendapat tersebut, Rachbini (2009 : 91) mengatakan bahwa dari 59,2 % memberikan kontribusi dalam pembentukan produk domestik bruto (PDB) sebesar 14 %, dan sebesar 45,2 % mampu membuka lapangan kerja dari total lapangan kerja yang ada. Dengan melihat besarnya peranan usaha kecil dan menengah dalam pembangunan ekonomi di Indonesia.

Di Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2010 terdapat 1.531 orang usaha industri kecil dan rumah tangga dan mampu menyerap tenaga sebanyak 2.875 orang, Dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah maka perlunya perhatian pemerintah yang lebih besar dan perhatiannya bukan hanya pada pemberian bantuan modal usaha tetapi juga perlunya pembinaan, sehingga mampu meningkatkan daya saing disegmen pasar dan dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Senada dengan pendapat tersebut, Masyuri (2003 : 187) mengatakan bahwa pembangunan ekonomi hendaknya diarahkan pada ekonomi yang bertumpu pada sumber lokal, memanfaatkan semaksimal mungkin dan berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan ekonomi maka usaha mikro kecil dan menengah agar tetap eksis dan berkelanjutan disamping dapat meningkatkan daya saing disegmen pasar, maka perlu diberikan kemudahan dan penyertaan untuk memperoleh modal usaha.

Dalam rangka mendorong pengembangan usaha industri kecil dan menengah maka pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 72 tahun 2009 tentang petunjuk Teknis pelaksanaan program pinjaman modal kredit bergulir untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Disamping pemerintah telah melakukan kerja sama dengan pihak Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Melak, yang diatur berdasarkan keputusan bersama (MoU) nomor 119/496/HK-TU.P/2007 dan Nomor 011/8-5/BPD-MLK/2007 tentang penyaluran modal kredit untuk usaha mikro, kecil dan menengah di wilayah Kabupaten Kutai Barat.

Dalam upaya pengembangan usaha mikro kecil dan menengah selain dilakukan dengan mengembangkan keterampilan pengusaha juga perlu ditopang dengan modal kerja, mengingat isu yang berkembang bahwa kurang berkembangnya usaha mikro kecil dan menengah disebabkan oleh kurangnya modal kerja. Seiring dengan upaya pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, maka pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 72 tahun 2009 tentang petunjuk teknis pelaksanaan program pinjaman modal kredit bergulir untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah.

Sehubungan dengan kebijakan tersebut pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah menggelirkan dana sebesar Rp. 32.000.000.000,- kepada pelaku usaha industri kecil dan menengah. Diharapkan melalui suntikan dana bantuan bergulir tersebut, para pelaku usaha mikro kecil dan menengah dapat lebih berkembang, mengingat selama ini yang dikeluhkan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah adalah terbatasnya modal usaha, maka dengan mendapatkan bantuan melalui kredit bergulir dapat dijadikan sebagai modal usaha untuk mendukung pengembangan usaha.

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Untuk mewujudkan akses (kemudahan) bagi pengusaha industri kecil, pemerintah telah berupaya melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Barat untuk melakukan hal-hal yang dapat memperlancar pelaksanaan program yang dikeluarkan pemerintah kabupaten., misalnya pemberian modal usaha yang memadai, meberikan pelatihan dan motivasi (dengan metode *Achievement Motivation Training* atau AMT yang bertujuan untuk membangkitkan etos kerja), teknik produksi, administrasi usaha, promosi pemasaran atau tatacara berkoperasi dan bahkan pemerintah berupaya memberikan perlindungan kepada pengusaha industri mikro, kecil dan menengah, misalnya melalui Undang-Undang Usaha Kecil (Raharjo,1995:59).

Pada era pembangunan seperti sekarang ini telah banyak upaya pembinaan dan pengembangan usaha yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang concern dengan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. Hanya saja, upaya pembinaan usaha kecil sering tumpang tindih dan dilakukan sendiri-sendiri. Dalam konteks itulah menurut Assauri (dalam Kuncoro, 1999 : 318) untuk mengembang-kan interorganizational process dalam pembinaan usaha mikro kecil dan menengah. Dalam praktek struktur jaringan dalam kerangka organisasi pembinaan usaha kecil dapat dilakukan dalam bentuk inkubator bisnis PKPK (Pusat Konsultasi Pengusaha Kecil), walaupun ide dasar pembentukan lembaga tersebut berasal dari institusi perindustrian, perdagangan, Koperasi dan UKM yang diharapkan dapat berfungsi sebagai wadah pengembangan pengusaha mikro kecil dan menengah menjadi tangguh

Selanjutnya pada masa orde reformasi, dimana pemerintah beru-paya lebih mengembangkan usaha industri kecil yang merupakan bagian dari ekonomi kerakyatan. Secara politis pemerintah telah menciptakan landasan hukum bagi pembinaan dan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah, namun landasan hukum tersebut dirasakan belum memadai dan kemudian pemerintah membuat produk hokum, seperti Keputusan Menteri Keuangan Nomor 40/KMK.06/2003 tentang pendanaan kredit usaha mikro dan kecil, dan Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah, merupakan salah satu pertim-bangan pokok dari tuntutan perkembangan kebutuhan dan tantangan pembangunan nasional, untuk itu diperlukan keberpihakan politik ekonomi yang memberikan kesempatan, dukungan, dan pengem-bangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi, usaha kecil, dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Dalam hal ini usaha kecil, mikro dan menengah sebagai pilar utama untuk pemba-ngunan ekonomi.

Pembinaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan,

pertumbuhan, terjadinya evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan sesuatu. (Thoah, 1986 : 178). Lebih lanjut dikatakan bahwa ada dua unsur dalam pengertian ini yakni pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan, dan kedua pembinaan menunjuk kepada perbaikan atas sesuatu.

Menurut Mubyarto (1994), menyatakan bahwa pada hakekatnya inti dari pembinaan berada pada diri manusia / rakyat. Faktor luar hanyalah berfungsi sebagai perangsang munculnya semangat, rasa atau dorongan pada diri manusia untuk memberi daya penguat, mengendalikan, mengembangkan dirinya sendiri berdasarkan potensi yang dimilikinya. Proses pembinaan ini dapat dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu (1) inisiatif dari pemerintah oleh pemerintah dan untuk rakyat, (2) Partisipatoris, dari pemerintah bersama masyarakat oleh pemerintah bersama masyarakat untuk rakyat dan (3) Emansipatoris, dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat (Priyono dan Pranarka, 1996 { 162}).

Berkenan dengan konsep pembinaan yang dikemukakan diatas bila dikaitkan dengan pembinaan pada bidang dunia usaha (industri kecil dan menengah) tentunya diarahkan untuk mengembangkan, kemandirian, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupari (Priyorio dan Pranarka, dalam Sedarmayanti, ,2000 : 273).

Pemahaman Pelaku Usaha Terhadap Program Pinjaman Modal Usaha Melalui Kredit Bergulir

Dalam rangka efektivitas program pinjaman modal usaha melalui kredit bergulir perlu pemahaman lebih lanjut, terutama mengenai esensi program sehingga arah dan tujuan program dapat dicapai lebih efektif.

Pemahaman terhadap program pinjaman modal usaha yang dikeluarkan kebijakan Bupati Kutai Barat nomor 72 Tahun 2009 meskipun belum semua pelaku usaha mengerti dan memahami terhadap makna dan esensi yang tersirat dalam kebijakan tersebut, tetapi secara aplikatif termasuk cukup efektif. Sebab hanya sebagian kecil pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang kurang memahami terhadap kebijakan tersebut. Hal tersebut disebabkan oleh sosialisasi yang kurang optimal karena pelaksana kebijakan hanya memberikan kesempatan pada pelaku usaha tertentu untuk mengikuti sosialisasi, sehingga tidak semua pelaku usaha dapat memahami makna yang tersurat dan tersirat dalam kebijakan tersebut. Disamping ini para pelaku usaha yang mengikuti sosialisasi tidak sepenuhnya menyebarkan informasi kepada pelaku usaha yang lain, sehingga pemahaman terhadap program pinjaman modal kredit bergulir dapat diserap secara efektif oleh para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Dengan demikian keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh pemahaman para pelaksana kebijakan dan para pelaku usaha, Jika keduanya

memahami mengenai konteks kebijakan, maka tidak terjadi interpretasi yang berbeda. Oleh karena itu hasil temuan tersebut didukung oleh teori seperti yang dikemukakan efektif (Abdul Wahab, 1997 : 162), bahwa implementasi kebijakan tidak terlepas kemampuan pelaksana kebijakan dalam memahami konteks kebijakan. Jika para pelaksana paham atas isi kebijakan, niscaya kebijakan tersebut secara aplikatif akan lebih. Kemudian juga didukung dengan pendapat Sunarko, ((2003 : 172) mengatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan, memang tidak terlepas dari pemahaman pelaksana kebijakan terhadap isi kebijakan

Dari hasil observasi menunjukkan bahwa pemahaman petugas pelaksana terhadap kebijakan program pinjaman modal kredit bergulir di Kabupaten Kutai Barat termasuk efektif. Dalam arti semua petugas pelaksana mengerti dan memahami makna yang tersirat dalam kebijakan tersebut. Sedangkan para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah belum semua memahami terhadap makna yang tersirat dalam kebijakan tersebut, baik mengenai mekanisme, proses, hingga konsekuensi yang harus ditanggung oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Dengan demikian tidak mengherankan jika terdapat sebagian kecil pelaku usaha mikro, kecil dan menengah terjadi perbedaan interpretasi dalam memahami kebijakan tersebut, sehingga membawa konsekuensi terhadap kurang efektifnya pengembalian pinjaman kredit bergulir.

Efektivitas Penyaluran Pinjaman Modal Kredit Bergulir Kepada Kelompok Sasaran

Penyaluran pinjaman modal kredit bergulir adalah suatu fasilitasi kredit modal kerja atau investasi yang disediakan untuk membantu usaha mikro, kecil dan menengah yang dapat digunakan sebagai modal kerja atau untuk membiayai usaha produktif.

Berdasarkan data empirik menunjukkan bahwa kebijakan Bupati Kutai Barat yang memberikan suntikan modal usaha melalui program pinjaman modal kredit bergulir nampaknya mendapat apresiasi di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Perkembangan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Kutai Barat meskipun tiap tahunnya mengalami pertumbuhan/peningkatan, tetapi secara kuantitas tidak mengalami peningkatan/penambahan yang signifikan. Hal tersebut terindikasi oleh target yang direncanakan dengan realisasi mengenai jumlah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Secara akumulatif hanya mencapai nilai rata-rata sebesar 84,42 %, tetapi secara parsial tingkat capaian terhadap pertumbuhan pelaku usaha termasuk beragam.

Pembinaan Kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Oleh Petugas Perindagkop dan UKM

Dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah maka perlu diberikan pembinaan sesuai bidang usaha yang ditekuninya. Seiring dengan upaya pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Kutai Barat, bahwa Dinas Perindagkop dan UKM telah melakukan pembinaan melalui berbagai bentuk pelatihan. Ada 5 jenis pelatihan yang diikuti sebanyak 57 orang dan semuanya mendapatkan legalitas sesuai jenis pelatihan yang diikuti. Diantaranya dibidang kewirausahaan diikuti sebanyak 12 orang, Pengembangan Mutu diikuti sebanyak 10 orang, Teknologi Proses diikuti sebanyak 15 orang, Teknik pemasaran diikuti sebanyak 9 orang dan pengembang-an kemitraan diikuti sebanyak 11 orang.

Dari jumlah tersebut jika dikonformasikan dengan jumlah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Kutai Barat belum mencapai yang diharapkan, sebab masih banyaknya pelaku usaha yang belum mendapatkan kesempatan yang sama. Meski demikian secara faktual mengenai pelatihan yang pernah diikuti sangat menunjang kelancaran aktivitas rutin bagi pengusaha dan mempunyai kontribusi yang berarti untuk mendukung pengembangan usaha, baik mikro, kecil maupun menengah.

Besarnya Bantuan Modal Usaha yang Disalurkan Kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Secara empirik bantuan modal usaha yang disampaikan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sangat membantu untuk mengembangkan usaha. Besarnya bantuan dana ternyata dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk menunjang kelancaran usaha, meskipun usaha yang dilakukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Barat belum mencapai hasil yang optimal, tetapi secara aplikatif bantuan modal usaha yang didistribusikan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah mampu membawa perubahan yang berarti terhadap sebagian besar pelaku usaha di Kabupaten Kutai Barat. Dengan suntikan modal usaha yang dilakukan melalui program pinjaman modal kredit bergulir dapat mendorong para pelaku usaha di Kabupaten Kutai Barat untuk mengembangkan usahanya. Ini berarti pemberian modal usaha yang disalurkan melalui kebijakan Bupati Kutai Barat mempunyai kontribusi yang besar terhadap pengembangan usaha yang dilakukan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah. Dengan demikian fakta yang terjadi ternyata diterima oleh teori yang dikemukakan oleh Irianto, (1996: 32), mengatakan bahwa untuk mendukung pengembangan usaha, perlu diberikan suntikan modal usaha (permodalan) yang dibutuhkan, dan disamping itu dalam proses perlunya diberikan kemudahan sehingga para pelaku usaha akan bergairah untuk mengembangkan usahanya.

Dengan demikian bantuan modal usaha penting untuk mendukung pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. Karena itu kebijakan Bupati Kutai Barat yang memberikan suntikan modal, kepada pelaku usaha mikro, kecil dan Menengah dengan nilai tercecil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan maksimal Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah); merupakan langkah positif, dalam rangka mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah serta membangun ekonomi masyarakat

Nilai Manfaat yang Dirasakan Pelaku Usaha Atas Pinjaman Kredit Bergulir

Pemberian pinjaman melalui kredit bergulir, bukan hanya untuk meningkatkan nilai investasi, tetapi dapat menambah nilai barang yang akan diproduksi, sehingga dapat memperkuat permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah. Dengan demikian pemberian pinjaman modal kredit bergulir mempunyai nilai manfaat yang berarti untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di Wilayah Kabupaten Kutai Barat.. Disisi lain dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan usaha mikro menjadi usaha kecil, dan dari usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sehingga dapat berkembang menjadi usaha menengah dan usaha besar. Hal lain yang dapat diraskan bagi pelaku usaha adalah meningkatkan kelompok usaha bersama yang memiliki kompetensi sehingga mampu meningkatkan daya saing di *segment* pasar dan pada gilirannya akan memberikan dampak peningkatan nilai tambah dan perluasan kesempatan kerja.

Dengan demikian, hasil temuan diobjek penelitian dapat dikatakan teori mendukung fakta, sebagaimana yang dikemukakan Thoha, 1997, 172) bahwa manfaat yang dirasakan bagi pelaku usaha dengan diberikan modal usaha, bukan hanya untuk penamabahan investasi tetapi memudahkan dalam melakukan pergerakan hasil produksi. Oleh karena itu, para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah telah menyambut baik atas kebijakan Bupati Kutai Barat yang memberikan modal usaha melalui pinjaman modal kredit bergulir. Ternyata bantuan tersebut besar kontribusinya untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah di wilayah Kabupaten Kutai Barat. Sebab penjaman tersebut merupakan kredit lunak yang tidak terlalu memberatkan/membebani para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

Kerja Sama Antar Petugas Pelaksana dalam Pendistribusian Pinjaman Modal Kredit Bergulir

Untuk efektifnya pelaksanaan program pinjaman modal kredit bergulir perlu dibangun kerjasama dan koordinasi yang baik antara petugas pelaksana Kerjasama adalah jalinan kerja diantara dua pihak atau lebih baik secara internal maupun eksternal organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kerjasama berfungsi untuk mengoptimalkan

keterpaduan antar pihak pelaksana sehingga diperoleh keserasian dan keselarasan dalam menyalurkan pinjaman kredit bergulir.

Hasil observasi menunjukkan bahwa secara implisit kerjasama yang dilakukan para pelaksana program pinjaman modal kredit bergulir di Kabupaten Kutai Barat termasuk efektif. Dalam hal kerjasama yang dibangun, tidak hanya terbatas pada pendistribusian bantuan modal usaha, tetapi juga dilakukan mulai pembuatan rencana kerja, pengolahan data, hingga membuat laporan pertanggungjawaban program. Dengan demikian terdapat hubungan yang selaras, selerasi dan seimbang dalam penyaluran bantuan modal usaha kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

Faktor-Faktor yang Mendukung Program Pinjaman Modal Kredit Bergulir Oleh Dinas Perindagkop dan UKM di Kabupaten Kutai Barat

- a. Undang-undang Nomor 32 dan 33 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, sehingga dengan kewenangan tersebut dapat mendorong kemandirian daerah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakatnya.
- b. Peraturan Bupati Nomor 72 tahun 2009 tentang petunjuk Teknis pelaksanaan program pinjaman modal kredit bergulir untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
- c. Keputusan Bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Dengan pihak Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Melak, Nomor 119/496/HK-TU.P/2007 dan Nomor 011/8-5/BPD-MLK/2007 tentang penyaluran modal kredit untuk usaha mikro, kecil dan menengah di wilayah Kabupaten Kutai Barat.
- d. Adanya komitmen yang kuat Bupati Kutai Barat dan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM untuk membangun perekonomian kerakyatan melalui program pinjaman modal kredit bergulir.
- e. Kondusifnya keadaan keamanan yang stabil di Kabupaten Kutai Barat memungkinkan program pinjaman modal kredit bergulir untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah tepat guna dan berhasil guna sehingga dapat meningkatkan kemandirian usaha, dan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat yang lebih baik.
- f. Terciptanya iklim kerjasama yang baik antara organisasi perangkat daerah, swasta dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sehingga secara bertahap dapat mewujudkan kemandirian perekonomian masyarakat

Faktor-faktor yang menghambat Program Pinjaman Modal Kredit Bergulir Oleh Dinas Perindagkop dan UKM di Kabupaten Kutai Barat :

- a. Terbatasnya sarana dan prasarana operasional untuk mendukung pengembangan IKM/UKM di Kabupaten Kutai Bratt
- b. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia pada pelaku usaha UKM dan aparat pembina
- c. UKM yang ada di Kabupaten Kutai Barat masih belum mampu memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya alam yang tersedia.
- d. Terbatasnya sumber pembiayaan untuk mendukung pengembangan IKM/UKM di Kabupaten Kutai Barat
- e. Kurang optimalnya dalam melakukan sosialisasi sehingga terjadi enterpretasi yang berbeda yang berbeda antar pelaku usaha, sehingga berujung pada pengembalian / angsuran kredit modal usaha dan modal penyertaan kurang efektif.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan Program Pinjaman Modal Kredit Bergulir untuk Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Kutai Barat, ternyata secara aplikatif menunjukkan indikasi cukup efektif, Hal tersebut dapat diketahui dari hasil temuan di objek peneltian secara aplikatif pendistribusian pinjaman modal kredit bergulir masih dihadapkan pada persoalan-persoalan teknis dan administratif, sehingga program pinjaman modal kredit bergulir yanag diperuntukkan pada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah belum sepenuhnya dapat diselesaikan sesuai yang diharapkan.
2. Ditinjau dari nilai manfaat bahwa program pinjaman modal kredit bergulir yang didistribusikan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM ternyata memiliki nilai manfaat yang sangat berarti untuk memacu pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam mengembangkan kemampuan usaha mikro menjadi usaha kecil, dan dari usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri bahkan dapat berkembang menjadi usaha menengah dan usaha besar, sekaligus mampu meningkatkan daya saing di segment pasar.
3. Dari aspek efektivitas penyaluran bantuan dana bergulir kepada par pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk cukup efektif dan hal tersebut tercermin oleh pendistribusian pinjaman modal kredit bergulir yang disampaikan petugas pelaksana kepada para pelaku usaha, .dapat

dikatakan tepat sasaran. Dalam arti pendistribusian pinjaman diprioritaskan bagi pelaku usaha yang memang sangat membutuhkan, meski demikian dalam proses tetap berpegang teguh prosedur atau mekanisme yang berlaku.

4. Ditinjau dari segi pembinaan bahwa dalam memprakarsai agar para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dapat lebih berkembang maka perlunya pembinaan sesuai bidang usaha masing-masing. Tidakan yang dilakukan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM sangat tepat, dan ada beberapa bentuk pembinaan yang dilakukan kepada pelaku usaha dan besar kontribusinya untuk mendukung pengembangan usaha.
5. Temuan lain mengenai besarnya bantuan yang diberikan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah memiliki esensi untuk mendukung pelaku usaha dalam meningkatkan dan mengembangkan usahanya, selain jumlahnya relatif besar dan tidak terlalu mengingikatkan dan dilakukan secara proporsional, yaitu besar kecilnya pinjaman yang diberikan sangat tergantung pada besar kecilnya usaha yang dimiliki.
6. Indikasi lain yang berkaitan dengan program pinjaman modal kredit bergulir adalah dalam hal kerja sama antar tim pelaksana. Sesuai hasil temuan di objek penelitian menunjukkan bahwa kerjasama yang dibangun oleh tim pelaksana dapat dikatakan. Kerjasama yang dibangun bukan hanya pada saat membuat rencana kerja tetapi kerjasama dalam pendistribusian bantuan hingga membuat laporan pertanggungjawaban kepada lembaga.
7. Faktor yang mendukung program pinjaman modal kredit bergulir meliputi Undang-undang Nomor 32 dan 33 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah Peraturan Bupati Nomor 72 tahun 2009 tentang petunjuk Teknis pelaksanaan program pinjaman modal kredit bergulir untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Keputusan Bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Dengan pihak Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Melak, Nomor 119/496/HK-TU.P/2007 dan Nomor 011/8-5/BPD-MLK/2007 tentang penyaluran modal kredit untuk usaha mikro, kecil dan menengah di wilayah Kabupaten Kutai Barat, dan komitmen yang kuat Bupati Kutai Barat dan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM untuk membangun perekonomian kerakyatan melalui program pinjaman modal kredit bergulir.
8. Beberapa temuan mengenai faktor-faktor yang penghambat meliputi terbatasnya sarana dan prasarana operasional untuk mendukung

pengembangan IKM/UKM di Kabupaten Kutai Barat, terbatasnya kualitas sumber daya manusia pada pelaku usaha IKM dan aparat pembina, IKM yang ada di Kabupaten Kutai Barat masih belum mampu memanfaatkan secara maksimal potensi sumber daya alam yang tersedia, Kurang optimalnya dalam melakukan sosialisasi sehingga terjadi enterpretasi yang berbeda yang berbeda antar pelaku usaha, sehingga berujung pada pengembalian / angsuran kredit modal usaha dan modal penyertaan kurang efektif.

Saran-saran

Berdasarkan hasil beberapa kesimpulan di atas penulis akan mencoba untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana operasional untuk menunjang aktivitas petugas pelaksana dakan menjalankan program, dan hal tersebut dapat dilakukan melalui rencana kerja tahun dan APBD
2. Meningkatkan kualitas aparatur yang bertindak sebagai pembina para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah agar mampu berfungsi secara efektif. Hal tersebut dilakukan melalui beberapa program pelatihan yang dibiayai oleh anggaran belanja Dinas.
3. Meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah agar lebih terampil dapat memanfaatkan dan mendayagunakan potensi daerah secara optimal sehingga mampu meningkatkan sumber pendapat keluarga.
4. Meningkatkan sosialisasi kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah, dengan menambah frekuensi pertemuan dan memberikan famlet kepada pelaku usaha yang belum mengerti dan memahami makna yang tersirat dalam program pinjaman modal kredit bergulir.
5. Melakukan pemantauan dan monitoring serta penagihan kredit macet untuk meminimalkan kemacetan angsuran kredit UMKM.

Daftar Pustaka

- Anonimus, Undang-undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004, *tentang Pemerintahan daerah dan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Indonesia. Jakarta.
- _____, Peraturan Bupati Nomor 72 tahun 2009 *tentang petunjuk Teknis pelaksanaan program pinjaman modal kredit bergulir untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah*. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.
- _____, Keputusan Bersama Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Dengan pihak Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Melak, Melalui keputusan bersama (MoU) nomor 119/496/HK-TU.P/2007 dan Nomor 011/8-5/BPD-MLK/2007 tentang penyaluran modal kredit untuk usaha mikro, kecil dan menengah di wilayah Kabupaten Kutai Barat.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Mubyarto. 1998. *Gerakan Penanggulangan Kemiskinan*, Laporan Penelitian di Daerah-daerah. Aditya Media, Yogyakarta.
- Rachbini, Didik, J., 1999 *Peluang Kemitraan Kawasan dan Pedesaan, dalam Hasan Basri (ed), 1999 Pembangunan Ekonomi Rakyat di Pedesaan Sebagai Strategi Penanggulangan Kemiskinan*, PT. Bina Rena Pariwara, Jakarta
- Swasono, Sri Edi, 1998, *Pendekatan Pemberantasan Kemiskinan*, Makalah pada Seminar Nasional HMJP Ekonomi, IKIP Malang
- Thoha, Miftah, 2001. *Perilaku Organisasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.